

## BAB VII

### SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2007

#### A. Prioritas RKPD 2007

Penyusunan prioritas RKPD Tahun 2007 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 dan Renstrada Tahun 2002-2007 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Kriteria penyusunan prioritas RKPD 2007 antara lain:

1. Sinkronisasi dengan 9 (sembilan) prioritas RKP Tahun 2007
2. Berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator program Renstrada DKI Jakarta 2002-2007
3. Peningkatan kualitas (*level of services*) pelayanan publik
4. Penyelesaian masalah perkotaan

#### B. Program Prioritas Menurut Bidang Pembangunan

Penyusunan Program Prioritas RKPD 2007 berdasarkan delapan bidang pembangunan yang terdapat pada Renstrada 2002-2007 yaitu: (1) Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa; (2) Bidang Pemerintahan; (3) Bidang Ekonomi; (4) Bidang Pendidikan dan Kesehatan; (5) Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan; (6) Bidang Sosial dan Budaya; (7) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan (8) Bidang Sarana dan Prasarana Kota, maka Sasaran dan Program Prioritas RKPD 2007 adalah sebagaimana tabel berikut:

### 1. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007	
1 HUKUM, TRAMTIB, KESBANG	Tegaknya supremasi hukum di Provinsi DKI Jakarta	Pengembangan peraturan perundang-undangan Daerah'	Terselenggaranya keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2006 dengan baik.	Evaluasi kinerja dan laporan keuangan tahun 2006	
				Evaluasi pelaksanaan Renstrada DKI Jakarta 2002-2007	
				Penyusunan Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Epidemik (Wabah); Penanggulangan bencana; pengelolaan sampah; Perda tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqoh; Pengelolaan Panti Sosial	
				Penyempurnaan Perda No. 4 tahun 1969 tentang peraturan kendaraan dan atau alat pengangkut (penomoran kendaraan); Perda No. 10 tahun 1994 tentang Pemberian Beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa warga DKI Jakarta; Perda No. 16 tahun 1968 tentang ketentuan wajib uji barang-barang hasil industri dalam lingkungan DKI Jakarta	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat Ibukota akan aturan hukum.	Peningkatan Kesadaran Hukum	Tersosialisasinya Peraturan Daerah yang terbit tahun 2006	Terselenggaranya Pilkada 2007 dengan aman dan tertib.	Pendataan pemilih, seleksi calon, pemilihan langsung, penetapan dan pelantikan Gub/Wagub terpilih
				Pengamanan Penyelenggaraan Pilkada 2007	
	Terwujudnya keharmonisan hidup di masyarakat..	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Crisis Center berfungsi efektif dan meningkatkan kesiapan penduduk DKI Jakarta dalam menghadapi bencana	Terbitnya Peraturan Pemerintah sbg penjabaran UU Megapolitan Jabodetabekjur (revisi UU 34)	Penyiapan bahan masukan PP serta Kajian kelembagaan dan pembiayaan pelayanan publik Megapolitan Jabodetabekjur
				Sosialisasi Perda yang terbit tahun 2006	
	Meningkatnya kualitas moral dan mentalitas, aparat penegak hukum Pemda Provinsi DKI Jakarta.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Crisis Center berfungsi efektif dan meningkatkan kesiapan penduduk DKI Jakarta dalam menghadapi bencana	Crisis Center berfungsi efektif dan meningkatkan kesiapan penduduk DKI Jakarta dalam menghadapi bencana	Penertiban pelanggaran Perda
					Penyiapan DKI Jakarta menghadapi ancaman banjir 5 tahunan
Peningkatan sarana dan prasarana tramtibmas					
				Penyelesaian kantor sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	
				Pembangunan Kantor sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan	

## 2. Bidang Pemerintahan

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007
2 PEMERINTAHAN	Terciptanya pemerintahan yang menjunjung <i>Good Governance</i>	Pengembangan kapasitas otonomi daerah.	Meningkatnya kapasitas organisasi perangkat Daerah provinsi DKI Jakarta merespon PP 58 Thn 2005, PP 65 Thn 2005, Permendagri 13 Thn 2006.	Penataan organisasi perangkat Daerah provinsi DKI Jakarta
	Terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional dengan dukungan sistem keuangan daerah dan sistem informasi yang handal.	Pengembangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Wilayah (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu).	Meningkatnya kapasitas Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan publik	Pemantapan manajemen program dan keuangan Kecamatan dan Kelurahan
		Penataan Administrasi Pertanahan.	Meningkatnya jumlah sertifikat hak atas tanah.	Peningkatan sertifikat massal
		Pengembangan Perencanaan dan pengendalian rencana	Ditetapkannya Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah (RPJP & RPJM) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.	Penyusunan Perda RPJPD dan RTRW, RPJM 2007-2012 provinsi DKI Jakarta
			Tersosialisasinya berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pengelolaan aset Daerah	Sosialisasi peraturan perundangan baru tentang keuangan, aset dan sistem akuntansi
		Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Terwujudnya model pengelolaan SDM berbasis kompetensi pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pengembangan SDM berbasis kompetensi tingkat SKPD
		Peningkatan Kerjasama antar daerah	Kesepakatan kelembagaan dan pembiayaan kerjasama pelayanan publik Megapolitan Jabodetabekjur.	Kajian kebijakan kelembagaan dan pembiayaan kerjasama pelayanan publik di Megapolitan Jabodetabekjur
		Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi.	Dimulainya e-procurement dilingkungan Pemerintah provinsi DKI Jakarta	Pembangunan sistem dan kapasitas operasional untuk penyelenggaraan e-procurement
		Terbangunnya sistem informasi terpadu untuk perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan.	Pembangunan sistem informasi terpadu, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pengawasan	

### 3. Bidang Ekonomi

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007
3 EKONOMI	Meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi DKI Jakarta.	Pengembangan produk pariwisata.	Berfungsinya Jalur Wisata Kota-Monas-Kebayoran	Penetapan pengelolaan Jalur Wisata Kota-Monas-Kebayoran
			Berfungsinya Inner Ring Road Kota Tua	Pengembangan sarana dan pelayanan pariwisata Kota Tua Pengembangan produk wisata kota tua
	Tercapainya pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat.	Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan.	Meningkatnya level of service peneraan alat ukur dan produk.	Penyiapan sistem dan SDM untuk peningkatan <i>level of service</i> peneraan alat ukur dan produk
			Meningkatnya keamanan Pangan terhadap produk peternakan	Penanggulangan Flu Burung (AI) di Provinsi DKI Jakarta
	Menurunnya angka pengangguran	Penataan dan restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan).	Terlaksananya tindak lanjut Perda pencabutan Perda 13,14,15 Tahun 2004	Penyelesaian kelembagaan RSUD menjadi BLU
			Meningkatnya kondisi usaha daerah (PD/BUMD/PT Patungan)	Peningkatan kondisi usaha daerah (PD/BUMD/PT Patungan)
	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain.	Terselenggaranya Promosi Investasi Internasional & Nasional Jakarta	Penyelenggaraan Promosi Investasi Internasional & Nasional Jakarta
			Terselenggaranya pelayanan perizinan investasi satu atap dan satu pintu	Penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi satu atap dan satu pintu
			Meningkatnya Fungsi Aset Daerah	Peningkatan Fungsi Asset Daerah
			Meningkatnya kapasitas lokasi binaan sebesar 5 unit	Peningkatan Kapasitas Lokasi Binaan
			Tertatanya lokasi Pedagang Kaki Lima sepanjang koridor busway	Penataan lokasi PKL di sepanjang koridor busway IV, V, VI dan VII
			Meningkatnya akses usaha skala mikro, menengah dan koperasi terhadap permodalan dan pemasaran	Pengembangan kerjasama usaha skala mikro dengan PPMK.
			Meningkatnya akses nelayan terhadap teknologi modal dan pemasaran hasil laut.	Peningkatan akses permodalan bagi UKM dan Koperasi
			Terwujudnya pola budidaya perikanan laut di Kepulauan Seribu di 4 Lokasi (P. Tidung, P. Pramuka, P. Pari dan P. Kelapa)	Peningkatan pengelolaan pelabuhan nelayan muara karang dan kamal
Terselesaikannya kebun bibit di 2 lokasi (multi years)	Penyelesaian kebun bibit			

#### 4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007
4 PENDIDIKAN dan KESEHATAN	Tercapainya pemerataan pendidikan	Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar, dan Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan.	Wajib Belajar 9 Tahun di sekolah negeri dan swasta	Legislasi Perda Sistem Pendidikan daerah (Sisdikda)
			Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan Guru	Pembiayaan pendidikan untuk Sekolah Negeri dan Swasta
			Tersusunnya program multiyears (rehab total dan bangun baru) untuk gedung sekolah.	Sertifikasi profesi dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan
			Beasiswa bagi siswa SMA/K/PLS berprestasi	Permutakhiran data sarana dan prasarana pendidikan (update AMP) di 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Kep. Seribu
	Menurunnya jumlah pemakai narkoba dan perkelahian pelajar	Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.	Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah	Beasiswa bagi siswa SMA/K/PLS berprestasi dan Perguruan Tinggi (khusus penyelesaian tugas akhir)
	Tercapainya kualitas pendidikan	Pengembangan Perpustakaan.	Meningkatnya cakupan layanan perpustakaan umum tingkat kecamatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas pamong belajar serta warga belajar
				Peningkatan sarana dan prasarana PLS (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar)
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan dukungan layanan kesehatan yang bermutu.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular (DBD, Flu burung, TBC paru, HIV-AIDS dan thypoid)	Penyediaan perpustakaan di tingkat Kecamatan (2 perpustakaan percontohan tingkat Kecamatan di 5 wilayah)
				Peningkatan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) terhadap penyakit menular (DBD, Flu burung, TBC paru, HIV-AIDS dan thypoid)
				Peningkatan Antisipasi potensi Kejadian Luar Biasa/KLB (DBD, Flu burung, Hepatitis, HIV-AIDS dan thypoid)
	Meningkatnya daya dukung sarana prasarana kesehatan DKI Jakarta	Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu layanan RS (swasta dan negeri)	Revitalisasi Posyandu
				Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas)
Sertifikasi dan penerapan ISO di RSUD dan Puskesmas				
Pembangunan RSUD Jakarta Selatan				
Penanganan gawat darurat kesehatan.	Perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan.	Meningkatnya layanan Ambulan Gawat Darurat provinsi DKI Jakarta	Peningkatan layanan UGD dan Ambulan 118	
			Terbangunnya sistem jaminan pelayanan kesehatan untuk miskin dan ekonomi lemah di provinsi DKI Jakarta .	Penerapan Sistem Kesehatan Daerah

### 5. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007
5 KEPENDUDUKAN dan TENAGA KERJA	Tersedianya data dasar kependudukan yang akurat dan dinamis	Pengendalian kependudukan.	Data pemilih Pilkada 2007 yang akurat	Pemutakhiran data pemilih Pilkada untuk 2007 (P4B)
	Tertib administrasi kependudukan.	Pembinaan administrasi kependudukan dan Catatan sipil.	Layanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Peningkatan monitoring dan pengawasan mobilitas penduduk Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Pembangunan Gedung penyimpanan registrasi Akta
	Terkendalinya jumlah penduduk DKI Jakarta.	Pengembangan Kesempatan Kerja.	Tersedianya Informasi Kesempatan Kerja	Peningkatkan Pelatihan, pemagangan dan penempatan tenaga kerja

## 6. Bidang Sosial dan Budaya

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007
6 SOSIAL BUDAYA	Terwujudnya kehidupan yang berakhlak, yang bermoral, berbudaya, disiplin, dan produktif.	Peningkatan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	Tersusunnya Perda Sistem Jaminan Sosial Daerah	Penyusunan dan penetapan Perda Sistem Jaminan Sosial Daerah
			Tersusunnya sistem dan prosedur penanganan PMKS	Penyusunan sistem dan prosedur penanganan PMKS
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih	Peningkatan kualitas pekerja sosial dan TKSM
			Meningkatnya kapasitas pelayanan panti sosial	Pembangunan Panti Cacat Terpadu
	Terwujudnya masyarakat mencintai dan komitmen membangun kotanya.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan dana PPMK	Penyusunan panduan pengelolaan dana PPMK pola baru
			Pemberdayaan Perempuan.	Diseminasi informasi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan
			Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga.	Peningkatan kualitas pembinaan atlet olahraga yang berpotensi meraih medali emas dalam PON
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan fasilitas olahraga eks- Boker
			Pengembangan museum dan pelestarian peninggalan cagar budaya	Peningkatan sarana dan prasarana di Kawasan Kota Tua
			Meningkatnya kualitas konservasi bangunan peninggalan bersejarah dan koleksi benda bersejarah di kawasan Kota Tua	

## 7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007
7 SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalnya pemanfaatan air tanah.	Pengembangan sumber air tanah.	Terbangunnya 2 sumur bor dan 150 titik sumur resapan	Pembangunan 2 sumur bor dan 150 titik sumur resapan
			Tersedianya sistim telemetri tersedianya harga dasar air bawah tanah	Pembangunan sistem Telemetri dan harga dasar air tanah
			Terlaksananya pengembangan SDA dan konservasi sumber air bawah tanah,	Pengecekan dokumen permohonan dan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) dengan sasaran sebanyak 500 titik sumur; Pemeriksaan, pembinaan kegiatan pemboran Air Bawah Tanah dan analisa laporan Air Bawah Tanah dengan sasaran 180 titik sumur; Pendataan, evaluasi dan analisa kondisi meter air sumur dan sumur pantek; Master plan pembangunan laboratorium penelitian Air Bawah tanah dan bahan galian; Pendataan pelanggan sesuai peruntukan air bawah tanah dan bahan galian dengan sasaran 3000 titik sumur
	Terkendalnya dampak pencemaran udara.	Peningkatan kualitas lingkungan.	Berfungsinya sistem pengendalian pencemaran laut	Pemantauan, penindakan dan pengendalian pencemaran laut
			Terlaksananya PROKASIH untuk meningkatkan kualitas perairan DAS	Peningkatan daya manfaat sungai, peningkatan koordinasi pengelolaan sungai dengan wilayah luar DKI Jakarta; dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan.
	Peningkatan pengendalian Dampak Lingkungan.	Peningkatan pengendalian Dampak Lingkungan.	Terlaksananya Perda 2/2006 tentang Pencemaran Udara	Sosialisasi Perda 2/2006 tentang Pencemaran Udara
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau.	Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Terciptanya keseimbangan lingkungan perkotaan yang teduh, nyaman, sehat, dan manusiawi.	Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan.	Dimulainya pembangunan ITF (WTE) Duri Kosambi	Pembangunan ITF (WTE) Duri Kosambi
			Peningkatan pelayanan kebersihan.	Perpanjangan masa penggunaan TPA Bantar Gebang
		Peningkatan pelayanan	Meningkatnya pelayanan jasa pengangkutan sampah di 5 wilayah kotamadya.	Peningkatan pelayanan jasa pengangkutan sampah di 5 wilayah kotamadya.
Pengembangan sumber daya pertambangan dan energi			Terlaksananya penyediaan listrik di Kepulauan Seribu	Terbangunnya sistem kabel bawah laut kepulauan seribu Tersedianya listrik kepulauan seribu dengan PLTD

## 8. Bidang Sarana dan Prasarana Kota

BIDANG	SASARAN 2002 - 2007	PROGRAM PRIORITAS 2002 - 2007	SASARAN RKPD 2007	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2007
8) SARANA dan PRASARANA KOTA	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung lingkungan dan SDA.	Pengembangan Pelayanan Air Limbah.	Berfungsinya sarana dan prasarana IPAL kawasan permukiman, perkantoran, dan kawasan industri kecil	Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana IPAL kawasan permukiman, perkantoran, dan kawasan industri kecil
		Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis.	Terselesaikannya satu segmen Kota Tua (fatahilih dan sekitarnya)	Penataan Kota Tua segmen fatahilih dan sekitarnya
			Berfungsinya Pantai publik Marunda sebagai sarana rekreasi masyarakat	Pembangunan Pantai publik Marunda
			Terintegrasinya kelembagaan pengembangan Pantai Utara ( BP Pantura dan BP KWB Sunda Kelapa)	Pengintegrasian kelembagaan pengembangan Pantai Utara ( BP Pantura dan BP KWB Sunda Kelapa)
	Menurunnya jenis dan jumlah permasalahan akibat rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh.	Penataan bangunan gedung Pemda.	Terlaksananya Pembangunan Gedung Blok G' dan 5 Kantor Walikota	Pelaksanaan Pembangunan Gedung Blok G' dan 5 Kantor Walikota
		Pengendalian Banjir.	Terlaksananya Pembebasan lahan BKT seluas 122 ha	Pembebasan lahan BKT seluas 122 ha
			Terpeliharanya sistem pengendali banjir dan drainase	Pemeliharaan sistem pengendali banjir dan drainase
			Tersedianya Masterplan pengembangan kawasan Banjir Kanal Timur (BKT)	Penyusunan Masterplan pengembangan kawasan Banjir Kanal Timur (BKT)
		Peningkatan Drainase Kota.	Terlaksananya Pembersihan bantaran Kali Angke sepanjang 3500m dan pembangunan sarana prasarana untuk persiapan pekerjaan fisik (normalisasi/pengerukan)	Pembersihan bantaran Kali Angke sepanjang 3500m dan pembangunan sarana prasarana untuk persiapan pekerjaan fisik (normalisasi/pengerukan)
			Terlaksananya normalisasi Banjir Kanal Barat 2 segmen (Jl. KS Tubun - Tomang & TB Angke - Teluk Gong)	Normalisasi Banjir Kanal Barat 2 segmen (Jl. KS Tubun - Tomang & TB Angke - Teluk Gong)
		Pengembangan jaringan jalan dan jembatan.	Penyelesaian FO dan Underpass (multi years)	Penyelesaian Pembangunan FO dan Underpass (multi years)
		Pengembangan sarana dan fasilitas perhubungan	Dimulainya pembangunan Subway	Pembebasan tanah dan persiapan Kelembagaan untuk Pembangunan Subway
			Selesaiannya Terminal Pelabuhan Penumpang Muara Angke	Penyelesaian Terminal Pelabuhan Penumpang Muara Angke
Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum.	Berfungsinya Busway Koridor VIII, IX dan X dan sistem feedernya.	Pembangunan Busway Koridor VIII, IX dan X dan sistem feedernya		
Pengembangan Perumahan.	Berfungsinya 300 unit Rumah Susun Marunda dan 600 unit Rusun Tipar Cakung (Rawa Bebek)	Pembangunan 300 unit Rumah Susun Marunda dan 600 unit Rusun Tipar Cakung (Rawa Bebek)		

### **C. RENCANA CAPAIAN RKPD 2007**

Adapun rencana capaian RKPD tahun 2007 menurut Bidang Pembangunan sebagai berikut:

1. Bidang Hukum Tramtib dan Kesbang antara lain:
  - a. Diterimanya keterangan dan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2006.
  - b. Terselenggaranya Pilkada 2007 secara demokratis dengan aman dan tertib.
  - c. Masyarakat memahami Peraturan Daerah yang ditetapkan tahun 2006.
  - d. Crisis Center berfungsi efektif dan penduduk DKI Jakarta lebih siap menghadapi ancaman banjir 5 tahunan dan bencana alam lainnya.
  - e. Tersedianya landasan hukum tentang Megapolitan-Jabodetabekjur.
2. Bidang Pemerintahan antara lain:
  - a. Tersusunnya rencana kerja SKPD tahun 2007 yang merefleksikan pemahaman dan respons terhadap PP 58 tahun 2005, PP 65 tahun 2005 serta Permendagri 13 tahun 2006.
  - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kelurahan dan Kecamatan.
  - c. Meningkatnya kemudahan dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah.
  - d. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM pada tiap SKPD.
  - e. Tersedianya draft kesepakatan kelembagaan dan pembiayaan kerjasama pelayanan publik Megapolitan-Jabodetabekjur.
  - f. Tersedianya Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah (RPJP & RPJM) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.
  - g. SKPD memahami dan menerapkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pengelolaan aset Daerah.
  - h. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan dengan dibangunnya sistem informasi terpadu.

- i. Efektifnya proses pelelangan dan pengadaan barang/jasa dengan mulai diterapkannya *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Bidang Ekonomi antara lain:
    - a. Meningkatnya aktivitas kepariwisataan di wilayah Kota, Monas dan Kebayoran.
    - b. Meningkatnya akses ke/dari Kota Tua dengan berfungsinya *Inner Ring Road* Kota Tua.
    - c. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap industri penggunaan jasa peneraan alat ukur dan produk.
    - d. Perubahan status 3 (tiga) RSUD berbentuk PT menjadi BLUD dengan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
    - e. Meningkatnya jumlah investasi internasional di Provinsi DKI Jakarta.
    - f. Penambahan lokasi binaan sebanyak 5 unit.
    - g. Bebasnya koridor Busway dari pedagang kaki lima.
    - h. Meningkatnya jumlah usaha skala mikro, menengah dan koperasi yang mendapatkan akses terhadap permodalan dan pemasaran.
    - i. Meningkatnya modal dan penggunaan teknologi modern serta kemudahan pemasaran hasil laut nelayan.
    - j. Terwujudnya pola budidaya perikanan laut di Kepulauan Seribu di 4 lokasi (P. Tidung, P. Pramuka, P. Pari dan P. Kelapa).
    - k. Terbangunnya kebun bibit di 2 lokasi (*multi years*).
  4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan antara lain:
    - a. Mempertahankan APK SD/MI tetap 120,4% dan meningkatkan APM SD/MI dari 98,84% menjadi 99%. Mempertahankan APK SMP/MTs tetap 105,33% dan meningkatkan APM dari 92,63% menjadi 95%. Meningkatkan APK SLTA dari 81,83% menjadi 82,13%.
    - b. Meningkatnya jumlah guru yang lulus uji kompetensi.
    - c. Meningkatnya kesejahteraan guru sejalan dengan peningkatan kompetensi.
    - d. Pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah menggunakan *Asset Management Plan (AMP)* yang sudah ada.
    - e. Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah.

- f. Meningkatnya jumlah penerima Beasiswa bagi siswa SMA/K/PLS berprestasi.
  - g. Penyediaan perpustakaan umum di tingkat kecamatan (2 perpustakaan percontohan di tingkat kecamatan di 5 wilayah).
  - h. Menurunnya kasus penyebaran penyakit menular (DBD, Flu burung, TBC paru, HIV-AIDS dan thypoid).
  - i. Menurunnya angka gizi buruk balita.
  - j. Meningkatnya jenis dan cakupan layanan di Puskesmas serta standarisasi pelayanan pada RS negeri dan swasta.
  - k. Terbangunnya RSUD di Jakarta Selatan.
  - l. Meningkatnya waktu tanggap (*response time*) pelayanan jasa Ambulan Gawat Darurat.
  - m. Disempurnakannya sistem jaminan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dan ekonomi lemah di provinsi DKI Jakarta.
5. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan antara lain:
- a. Tersedianya data pemilih Pilkada 2007 yang akurat.
  - b. Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan berkualitas.
  - c. Terintegrasinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  - d. Tersedianya Informasi Kesempatan Kerja yang terkini di tingkat Sudin Tenaga Kerja dan Seksi Tenaga Kerja di Kecamatan.
6. Bidang Sosial dan Budaya antara lain:
- a. Legislasi Perda Sistem Jaminan Sosial Daerah.
  - b. Meningkatnya jumlah PMKS yang terlayani panti sosial.
  - c. Kecukupan tenaga pekerja sosial dan peningkatan kompetensi pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih.
  - d. Penanganan PMKS sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
  - e. Revitalisasai kawasan kota tua sebagai peninggalan sejarah dan objek wisata.
  - f. Tercapainya prestasi Provinsi DKI Jakarta sebagai juara umum PON.
  - g. Tersedianya sarana olah raga untuk pembinaan generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga.

- h. Meningkatnya kemampuan pengelolaan dana bergulir PPMK di kelurahan melalui pembentukan lembaga keuangan mikro.
  - i. Penyaluran dana Bina Fisik dan Bina Sosial tepat sasaran.
  - j. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan kepada perempuan.
7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup antara lain:
- a. Terbangunnya ITF (WTE) Duri Kosambi.
  - b. Diperolehnya kesepakatan perpanjangan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang.
  - c. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda 2/2006 tentang Pencemaran Udara.
  - d. Terkendalinya pencemaran laut di Teluk Jakarta.
  - e. Pembangunan Jalur Hijau kota seluas 145 Ha, pembangunan taman interaktif di 20 lokasi, refungsionalisasi taman dan jalur hijau di 40 lokasi, serta peningkatan jumlah pohon pelindung sebanyak 53.500 pohon.
  - f. Tersedianya Studi Kelayakan dan *masterplan* Kelistrikan Kepulauan Seribu.
8. Bidang Sarana dan Prasarana Kota antara lain :
- a. Terlaksananya Pembebasan lahan BKT seluas 122 ha.
  - b. Terlaksananya pembersihan bantaran Kali Angke sepanjang 3500m dan pembangunan sarana prasarana untuk persiapan pekerjaan fisik (normalisasi/pengerukan).
  - c. Terlaksananya normalisasi Banjir Kanal Barat 2 segmen (Jl. KS Tubun – Tomang & TB Angke – Teluk Gong).
  - d. Terlaksananya pembangunan Waduk Ciawi.
  - e. Terpeliharanya sistem pengendali banjir dan drainase.
  - f. Tersedianya *masterplan* pengembangan kawasan Banjir Kanal Timur (BKT).
  - g. Berfungsinya Busway Koridor 8, 9 dan 10 dan sistem *feeder*-nya.
  - h. Dimulainya pembebasan lahan untuk Subway.
  - i. Selesainya Terminal Pelabuhan Penumpang Muara Angke.
  - j. Penyelesaian *Flyover* dan *Underpass* (*multiyears*).
  - k. Terselesaikannya satu segmen Kota Tua (Fatahilah dan sekitarnya).

- l. Pantai publik Marunda.
- m. Berfungsinya 300 unit rusun Marunda dan 600 unit rusun Tipar Cakung .
- n. Terintegrasinya kelembagaan pengembangan Pantai Utara (BP Pantura dan BP KWB Sunda Kelapa).
- o. terselesaikannya pembangunan Balaikota dan Kantor Walikota.
- p. Berfungsinya sarana dan prasarana IPAL kawasan permukiman, perkantoran, dan kawasan industri kecil.
- q. Ditetapkannya Perda Tata Ruang.

#### **D. PENDANAAN**

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2007, kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2001.

Untuk tahun 2007, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Atas dasar ini, tantangan pokok yang dihadapi kebijakan fiskal akan banyak berkaitan dengan upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan lainnya adalah meningkatkan secara bertahap rasio pendapatan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan tersebut, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2007 akan tetap difokuskan pada langkah-langkah antara lain: (1) mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan; (2) meningkatkan efisiensi

pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan; (3) meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui ekstensifikasi PAD, Bagi Hasil Pajak, dan Dana Perimbangan yang lebih proporsional; dan (4) meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

## **E. PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan pokok di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan di tahun 2007. Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

### **1. Intensifikasi Pajak/Retribusi**

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- b. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah.
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait.
- f. Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### **2. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi**

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.

- b. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus.
- c. Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target group baru.
- d. Peningkatan bagi hasil pajak.

3. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- 1) Perbaikan manajemen menuju Jakarta Incorporated (Holding Company).
- 2) Pembentukan *subholding*.
- 3) Percepatan divestasi saham-saham Pemda pada PT patungan yang tidak prospektif dan merugi.
- 4) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi.

Pendapatan daerah tahun 2007 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Jakarta maupun nasional pada tahun 2006 dan tahun 2007 serta realisasi pendapatan daerah tahun 2006.

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain yang sah dengan menggunakan model ekonometrik. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/ penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.

**Tabel VII.1. Asumsi Dasar Perhitungan Pendapatan Daerah Tahun 2007**

Variabel	Nasional		DKI Jakarta	
	APBN 2006	RKP 2007	APBD 2006	RKPD 2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan Ekonomi	6,2	6,4	6,0	6,6
Inflasi	8,0	6,0	9,9	7,5
Nilai Tukar Rupiah thd US Dolar	9.900	9.700	9.900	9.700

Ada tiga variabel bebas (*exogeneous*) yang dimasukkan dalam model simulasi pendapatan daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan faktor lain yang meliputi penguatan rupiah terhadap dolar, intensifikasi pajak, dinamika jumlah penduduk, dan kesadaran pajak. Pada tabel VII.1 disajikan asumsi dasar perhitungan pendapatan daerah tahun 2007 yang dimasukkan ke dalam model simulasi pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 akan melebihi pendapatan daerah tahun 2006, namun peningkatan pendapatan tahun 2007 tidak dapat setinggi peningkatan pendapatan tahun 2006 terhadap pendapatan tahun 2005. Hal ini disebabkan adanya kebijakan kenaikan BBM yang dikeluarkan Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2005, nilai tukar rupiah masih berfluktuasi secara tajam, dan harga minyak dunia masih berada di atas US\$ 70 per barrel. Ini semua akan berpengaruh pada kinerja perekonomian daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah.

Dari hasil simulasi diperkirakan PAD akan naik 15,4 persen dari angka perubahan tahun 2006, sementara dana perimbangan di perkirakan akan mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2006 yaitu sebesar 18,9 persen dan diperkirakan tidak ada pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Dengan demikian total pendapatan daerah akan meningkat sebesar 16,9 persen.

Tabel VII.2 menyajikan secara rinci target pendapatan daerah tahun 2007 dimana angka-angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan serta kendala pendapatan 2006 sampai dengan perubahan APBD 2006.

Pendapatan asli daerah yang merupakan komponen terbesar pendapatan daerah pada tahun 2007 mengalami kenaikan lebih lambat dibanding tahun 2006. Penurunan pendapatan dari pajak daerah utamanya pada pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) lebih disebabkan berkurangnya animo masyarakat dalam membeli kendaraan roda empat. Sumber PAD terbesar diperoleh dari pajak daerah yaitu Rp. 8.334,28 milyar atau naik 16,8 persen dari penerimaan tahun 2006 (angka Perubahan). Sedangkan komponen lainnya diperkirakan mengalami kenaikan tidak berbeda dengan tahun lalu yaitu masing-masing retribusi daerah Rp. 510,6 milyar, laba usaha daerah Rp. 175 milyar dan lain-lain PAD yang sah Rp. 728,6 milyar.

Sumber terbesar komponen dana perimbangan adalah bagi hasil pajak yang diperkirakan tahun 2007 mencapai Rp. 7.000 milyar atau naik 21,4 persen dari angka Perubahan APBD 2006. Komponen ini terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Sejalan dengan komponen bagi hasil pajak, komponen bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat diperkirakan meningkat cukup berarti yaitu Rp. 150 milyar atau naik 50 persen. Sementara Dana Alokasi Umum diperkirakan tidak mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yaitu Rp. 722 milyar. Sehingga total pendapatan daerah tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp. 17.670,50 milyar.

Tabel VII.2. Ikhtisar Pendapatan Daerah Tahun 2007

Komponen	APBD 2006 (Perubahan)		RAPBD 2007	
	Nilai (Milyar Rp)	Peningkatan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Peningkatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.449</b>	<b>19,4</b>	<b>9.749</b>	<b>15,4</b>
a. Pajak Daerah	7.137	16,7	8.334	16,8
b. Retribusi Daerah	440	18,1	511	16,0
c. Laba Usaha Daerah	130	25,5	175	34,8
d. Lain-Lain PAD Yang Sah	742	53,8	729	(1,7)
<b>2. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>6.661</b>	<b>26,7</b>	<b>7.922</b>	<b>18,9</b>
a. Bagi Hasil Pajak	5.764	31,2	7.000	21,4
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	125	38,9	150	20,0
c. Dana Alokasi Umum	772	(0,1)	772	-
<b>3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>(100,0)</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15.109,68</b>	<b>21,5</b>	<b>17.670,50</b>	<b>16,9</b>

## F. BELANJA DAERAH

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (*performance-based budgeting*). Istilah belanja yang digunakan pada tahun 2007 ini dikenal sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran yang dianut sekarang merupakan satu kesatuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kemudian pengelompokan belanja daerah dirumuskan ke dalam bidang, fungsi, program, kegiatan dan rincian kegiatan.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2007 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada

jajaran pemerintahan dari tingkat Kotamadya/Kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah adalah: (1) melakukan efisiensi belanja; (2) menjamin terlaksananya program *dedicated* (3) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (urusan wajib dan pilihan) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004; (4) meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan; (5) mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (*bottom-up*), (6) menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang; (7) meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat; dan (8) menata proporsi alokasi anggaran antar wilayah, provinsi dengan wilayah, serta SKPD dengan Sudin dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Berdasarkan kebijakan belanja di atas, maka elaborasi kebijakan ke dalam rencana kerja tahun 2007 antara lain berupa:

- 1) Efisiensi belanja dengan cara menurunkan jumlah Kegiatan dan Rincian Kegiatan, serta identifikasi target dan capaian kegiatan guna memudahkan dalam pengendalian perencanaan dan pelaksanaan.
- 2) Menjamin kontinuitas pelaksanaan program *dedicated* serta penyelesaian program *dedicated* sesuai jadwal (Penyelesaian pembebasan tanah BKT; Penyelesaian Busway koridor 8, 9, 10; PPMK; Rehabilitasi gedung sekolah; Penguatan Kelurahan Rp. 1,7 Miliar dan Kecamatan Rp. 3.25 Miliar; dll)
- 3) Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan cara memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib daerah;
- 4) Peningkatan proporsi alokasi Kotamadya dan UPT (termasuk kecamatan dan kelurahan) dari 46,22 persen menjadi 46,66 persen, serta rehab gedung SD dan SMP dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar.
- 5) Menganggarkan Kelurahan sebesar Rp. 1,7 Miliar dan Kecamatan Rp. 3,25 Miliar yang merupakan instrumen untuk mengakomodir aspirasi masyarakat kelurahan.

- 6) Peningkatan proporsi pendidikan dari 20,95 persen menjadi 22,94 persen, dan proporsi kesehatan dari 5,91 persen menjadi 5,99 persen.

Struktur belanja daerah tahun 2007 terdiri dari tiga komponen, yaitu Belanja Variabel, Belanja Pegawai, serta Belanja Telepon, Air dan Listrik (TAL). Komponen belanja variabel terdiri dari Belanja Prioritas *Dedicated*, Belanja Prioritas SKPD dan Belanja *Multiyears*. Belanja Prioritas *Dedicated* berisi pagu indikatif kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh SKPD. Sedangkan Belanja Prioritas SKPD merupakan pagu untuk melaksanakan kegiatan SKPD sesuai dengan rencana kerja SKPD. Sedangkan pagu *Multiyears* digunakan untuk menganggarkan kegiatan *Multiyears* yang telah disetujui DPRD.

Berdasarkan perkiraan pendapatan dan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 2.2268 milyar atau sebesar 12,5 persen maka pendapatan daerah secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp. 20.002,24 milyar. Anggaran akan digunakan untuk keperluan belanja setelah dikurangi dengan pengeluaran daerah untuk membayar hutang pokok dan penyertaan modal. Sehingga belanja daerah 2007 diperkirakan meningkat sebesar 11,4 persen dibandingkan anggaran tahun 2006.

## **G. PEMBIAYAAN**

Dalam struktur APBD, di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan, sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2007, sumber penerimaan utama pembiayaan ditetapkan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu berupa

sisanya penyerapan belanja tahun 2006 dan tidak menggunakan Dana Cadangan Daerah (DCD). Pada pembiayaan daerah tahun 2007 ini, diasumsikan tidak terjadi pelampauan target pendapatan 2006 dan penyerapan belanja diperkirakan sekitar 87,5 persen. Untuk alternatif pinjaman, obligasi, ataupun lainnya belum dilakukan pada tahun 2007. Sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal pemerintah dalam rangka mendukung pembelian saham Kawasan Berikat Nusantara, pembangunan akses *Harbour Road Priok*, investasi alat produksi PT Dharma Raya .

**Tabel VII. 3. Ikhtisar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007**

Komponen	APBD 2006 (Perubahan)		RAPBD 2007	
	Nilai (Milyar Rp)	Peningkatan (%)	Nilai (Milyar Rp)	Peningkatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. PENDAPATAN</b>	<b>15.109,68</b>	<b>21,47</b>	<b>17.779,56</b>	<b>17,67</b>
<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.448,68</b>	<b>19,44</b>	<b>9.748,50</b>	<b>15,38</b>
a. Pajak Daerah	7.137,00	16,71	8.334,28	16,78
b. Retribusi Daerah	440,34	18,07	510,60	15,95
c. Laba Usaha Daerah	129,78	25,52	175,00	34,84
d. Lain-Lain PAD Yang Sah	741,55	53,79	728,63	(1,74)
<b>2. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>6.661,00</b>	<b>26,73</b>	<b>7.922,00</b>	<b>18,93</b>
a. Bagi Hasil Pajak	5.764,00	31,20	7.000,00	21,44
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	125,00	38,89	150,00	20,00
c. Dana Alokasi Umum	772,00	(0,13)	772,00	-
<b>3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>-</b>	<b>(100,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. BELANJA</b>	<b>17.855,86</b>	<b>25,67</b>	<b>19.813,62</b>	<b>10,96</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(2.746,18)</b>	<b>55,21</b>	<b>(2.143,12)</b>	<b>(21,96)</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>2.746,18</b>	<b>55,21</b>	<b>2.143,12</b>	<b>(21,96)</b>
1. PENERIMAAN DAERAH	3.008,71	55,87	2.331,74	(22,50)
a. Sisa Lebih PATYL	2.808,71	67,16	2.331,74	(16,98)
b. Transfer dari DCD	200,00	(20,00)	-	(100,00)
2. PENGELUARAN DAERAH	262,53	63,16	188,62	(28,15)
<b>TOTAL APBD</b>	<b>18.118,39</b>	<b>26,09</b>	<b>20.002,24</b>	<b>10,40</b>

#### H. DANA DEKONSENTRASI

Selain dana APBD, pembangunan daerah juga dibiayai dari dana APBN berupa dana dekonsentrasi. Adapun dana dekonsentrasi berasal dari departemen-departemen teknis dan dilaksanakan oleh SKPD tingkat provinsi terkait.

Dana Dekonsentrasi yang diterima Pemerintah Provinsi tahun 2006 adalah sebesar Rp. 620,28 miliar yang berasal dari 12 departemen dan dilaksanakan oleh 12 SKPD di tingkat provinsi. Dana sebesar Rp. 620,28 miliar tersebut dialokasikan pada sektor pendidikan sebesar Rp. 531,56 miliar (85,7 persen), kesehatan sebesar Rp. 27,27 miliar (4,4 persen), bintal kesos sebesar Rp. 18,46 miliar (2,96 persen), ketenagakerjaan sebesar Rp. 16,31 miliar (2,63 persen), dan sektor ekonomi sebesar Rp. 22,4 miliar (3,61 persen) serta sektor lainnya rata-rata mendapat alokasi dibawah 1 persen.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah provinsi agar lebih optimal, pada anggaran tahun 2007 pemerintah provinsi mengajukan usulan kegiatan dekonsentrasi sebesar 2,48 triliun rupiah. Usulan kegiatan diprioritaskan untuk pendidikan, ketahanan pangan, rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, kesehatan serta lain-lain (tabel VII.4)

**Tabel VII.4. Rekap Usulan Program/Kegiatan Dekonsentrasi menurut Unit/SKPD DKI Jakarta, Tahun 2007**

No.	Unit Pelaksana	Anggaran	Persentase
1	Dinas Pertanian dan Kehutanan	966.500,80	38,96
2	Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan	13.308,60	0,54
3	Dinas Perindustrian & Perdagangan	872,00	0,04
4	Dinas Koperasi & UKM	2.060,00	0,08
5	Dinas Pertambangan	3.200,00	0,13
6	Dinas Pekerjaan Umum	472.800,00	19,06
7	Dikdas dan Dikmenti	831.649,60	33,53
8	Dinas Kesehatan	129.105,80	5,20
9	Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi	14.821,10	0,60
10	Dinas Bintal & Kesos	29.77,60	1,20
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.046,00	0,16
12	Kantor Diklat	2.500,00	0,10
13	Bakesbang	2.400,00	0,10
14	Dinas Dukcapil	750,00	0,03
15	Biro Adwil	1.700,00	0,07
16	Dinas Trantib dan Linmas	2.000,00	0,08

No.	Unit Pelaksana	Anggaran	Persentase
17	Bawasda	500,00	0,02
18	Biro Keuangan	1.000,00	0,04
19	KPTI	500,00	0,02
20	Biro Hukum	500,00	0,02
21	Dispenda	500,00	0,02
Jumlah		2.480.485,50	100,00

## I. DANA MASYARAKAT

Hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta secara makro dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari PDRB sektoral dapat dilihat bahwa peranan pemerintah dalam menciptakan nilai tambah hanya sebesar 4 persen dari nilai total PDRB seluruh sektor. Demikian juga dari sisi PDRB penggunaan (investasi) peranan pemerintah hanya sebesar 5 persen dari total investasi yang tercipta sehingga peran dana masyarakat dalam pembangunan sangatlah dominan (lebih dari 90 persen).

Dengan demikian pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah dengan wujud APBD dan APBN merupakan sebagian kecil dari biaya pembangunan secara keseluruhan. Karena pembangunan pada dasarnya adalah kegiatan yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah mendorong dan mengarahkan pembangunan untuk mencapai tujuan dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan serta sebagai penyedia sarana dan prasarana agar kegiatan pembangunan dapat berlangsung.

